



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dapat dijadikan sebagai referensi data untuk sebuah penelitian baru. Oleh karena itu dalam mengerjakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian ini untuk dijadikan sebagai acuan.

<b>Apa saja yang diuraikan</b>	<b>Nama Peneliti/ Univeristas/ Tahun</b>	<b>Nama Peneliti/ Universitas/ Tahun</b>
	Yaninta Sani Sawitri Universitas Sebelas Maret 2009	Elvina Lee Universitas Multimedia Nusantara 2014
<b>Judul</b>	Rasisme Dalam Film Crash (Analisis Semiotik tentang Representasi Rasisme di Negara Multi Ras dalam Film Crash)	Representasi Kekerasan Pada Film Tanda Tanya (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)
<b>Permasalahan</b>	Tanda-tanda apakah yang digunakan untuk merekpresentasikan rasisme yang terjadi dalam Film Crash?	Bagaimana representasi kekerasan ditampilkan dalam film Tanda Tanya?
<b>Metode</b>	Menggunakan metode penelitian	Menggunakan metode kualitatif

	<p>kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiologi Roland Barthes sebagai teknik analisis datanya.</p>	<p>dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah semiotika Charles Sanders Peirce.</p>
<p><b>Hasil Temuan</b></p>	<p>Film Crash merupakan film yang memberikan gambaran terjadinya rasisme dalam berbagai bidang kehidupan di kota Los Angeles, California. Persoalan rasisme yang ditampilkan dalam film Crash masih didominasi oleh rasisme antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Hal ini dilatarbelakangi dari sejarah panjang atas berbagai tindakan rasisme pada warga kulit hitam, mulai dari diskriminasi, perbudakan, dan pembantaian.</p>	<p>Terdapat nilai kekerasan yang ditampilkan dalam film Tanda Tanya. Kekerasan yang terjadi diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan seperti agama dan etnis. Film tersebut berisi terjadinya konflik agama yang berujung pada kekerasan, juga menampilkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kekerasan yang ditampilkan berupa pemboman rumah ibadah, penusukan, perkelahian, dan lain-lain.</p>

Peneliti memilih penelitian sejenis diatas karena kedua penelitian tersebut mempunyai kesamaan, yakni mengangkat film sebagai media yang merepresentasikan sesuatu. Representasi yang dimaksud juga berhubungan

dengan penyimpangan sosial yang dilatarbelakangi karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Yaninta berangkat dari fenomena rasisme yang sering dikonstruksi oleh film-film Hollywood. Film *Crash* memberikan gambaran berbagai kejadian yang didasari oleh rasisme. Kejadian ini mengarah pada bentrokan antar ras yang bersifat kekerasan rasial, seperti perampokan, ejekan, prasangka buruk, stereotipe negatif, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Sementara penelitian yang dilakukan Elvina Lee berdasarkan realitas sosial yang ditampilkan dalam film Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan intoleransi agama di Indonesia. Perbedaan keyakinan dan pemahaman seringkali menjadi suatu bentuk konflik antar umat beragama, yang juga ditampilkan lewat sebuah film.

Kedua penelitian tersebut juga menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yaninta Sari Pratiwi memakai pendekatan semiologi Roland Barthes untuk analisis datanya, sedangkan peneliti menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce.

## **2.2. Teori dan Konsep**

### **2.2.1. Komunikasi Massa**

Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Maka dikenallah: komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi

antarpribadi, komunikasi kelompok (kecil), komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa (Mulyana, 2008:17).

Menurut Mulyana, komunikasi massa (*mass communication*) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen (2008:83).

Komunikasi massa memiliki proses yang berbeda dengan komunikasi tatap muka. Karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit (Bungin, 2008:74).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan melalui media massa di mana proses komunikasi didominasi oleh lembaga yang menentukan agendanya. Seperti yang disampaikan oleh Mulyana, pesan-pesannya (komunikasi massa) bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas (khususnya media elektronik)(2008:84).

Komunikasi massa memang tidak pernah luput dari media massa sebagai alat untuk menyebarkan konten-nya kepada khalayak. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa (Bungin, 2008:85). Menurut Bungin (2008:85-86), dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan:

1. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setia saat mendidik

masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju.

2. Selain itu, media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi, sebaliknya pula masyarakat akan menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan kemampuannya.
3. Terakhir media massa sebagai hiburan. Sebagai *agent of change*, media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Sebagai *agent of change* yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah, dengan demikian media massa juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya.

## **2.2.2. Film**

### **2.2.2.1. Pengertian, Jenis, dan Unsur Film**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.VII tahun 1992 tentang perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya (Perdana, 2013).

Film menjadi sebuah sajian dari rangkaian gambar dan suara yang memikat perhatian. Melalui gambaran-gambaran yang disajikan di layar, film mengungkapkan maksudnya, menyampaikan fakta dan mengajak penonton berhubungan dengannya. Serangkaian gambar yang bergerak dan terangkai, serta suara dalam film merupakan suatu simbol-simbol yang harus dipahami dan dikuak maknanya oleh penonton. Tujuannya untuk mengetahui pesan-pesan yang terdapat di dalam suatu film. Pembuat film mengajak penontonnya menerima data, fakta, gagasan, pandangan, pikiran, cita-citanya dan saling berbicara (Mangunhardjana, 1995:109).

Film juga berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, serta menyajikan cerita,

peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 2003:13). Jenis-jenis film menurut Sumarno (1996:10) yaitu:

1. Film cerita
2. Film noncerita
3. Film eksperimental dan film animasi

Film “3 Hati 2 Dunia 1 Cinta” merupakan jenis film cerita yang memiliki genre drama. Genre diartikan sebagai jenis film yang ditandai oleh gaya, bentuk, atau isi tertentu. Ada yang disebut film drama, film horor, film perang, film sejarah, film fiksi-ilmiah, film komedia, film laga, film khayalan, dan film koboi.

Sebuah film terbentuk dari beberapa unsur pembentuk di dalamnya. Pratista (2008:1) mengatakan bahwa film secara garis besar dapat dibagi atas dua unsur pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Masing-masing unsur tersebut tidak akan dapat membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita katakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. Berikut penjelasan mengenai unsur sinematik dan naratif yang dijabarkan oleh Pratista (2008:1-2) dalam bukunya *Memahami Film*:

Unsur sinematik atau juga sering diistilahkan gaya sinematik adalah merupakan aspek-aspek teknis pembentuk film. Unsur sinematik terbagi menjadi empat elemen pokok yakni:

1. Mise-en-scene, yaitu segala hal yang terletak di depan kamera yang akan diambil gambarnya dalam sebuah produksi film. Mise-en-scene terdiri

dari empat aspek utama, yaitu: setting(latar), kostum dan tata rias (make up), pencahayaan (lighting), para pemain dan pergerakannya (akting)

2. Sinematografi, yaitu mencakup seluruh perlakuan sineas terhadap kamera dan stpk filmnya. Unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni: kamera dan film, framing, serta durasi gambar.
3. Editing, definisi editing pada tahap produksi adalah proses pemilihan serta penyambungan gambar-gambar yang telah diambil. Sementara definisi editing setelah filmnya jadi (pasca produksi) adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menghubungkan tiap shoot-nya.
4. Suara, yaitu seluruh suata yang keluar dari gambar, yakni dialog, musik, dan efek suara.

Masing-masing elemen sinematik tersebut juga saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk gaya sinematik secara utuh.

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film cerita tidak mungkin terlepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memilih unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, serta lainnya. Seluruh elemen tersebut saling berinteraksi serta berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. Seluruh jalinan peristiwa tersebut terikat oleh sebuah aturan yakni, hukum kasualitas (sebab-akibat). Aspek kausalitas bersama unsur ruang dan waktu adalah elemen-elemen pokok pembentuk naratif.

### 2.2.2.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa

Menurut Bungin (2008:71), komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Sedangkan media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula (Bungin, 2008:72).

Salah satu bentuk atau wujud media massa yang paling populer yaitu televisi disamping adanya radio, koran, majalah. Wilbur Schramm, dalam bukunya *Mass Media and National Development*, membagi media massa menjadi empat generasi, dan film termasuk dalam generasi ke tiga, bersama dengan fotografi, slide, radio dan televisi (Amura, 1989 : 129).

Sebagai salah satu media komunikasi massa, film mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Effendy, 2001:27):

1. Pesan dalam film berlangsung satu arah

Tidak ada arus balik antara komunikan dan komunikator. Sutradara film sebagai komunikator tidak mengetahui tanggapan khalayak terhadap pesan dalam film yang dibuatnya. Sutradara tidak mengetahui apakah khalayak suka atau tidak terhadap film yang dibuatnya. Sutradara mengetahui film yang disukai khalayak melalui penjualan tiket bioskop dan DVD film yang dibuatnya. Semakin banyak tiket bioskop dan DVD film terjual berarti khalayak menyukai film tersebut.

## 2. Komunikator film melembaga

Dalam pembuatan film melibatkan sejumlah orang yang terkoordinasi dan memiliki peran yang berbeda-beda, seperti produser, sutradara, artis, dan kru film lainnya.

## 3. Pesan film bersifat umum

Pesan yang disampaikan film bersifat umum karena ditujukan oleh khalayak banyak.

## 4. Menimbulkan keserempakan

Keserempakan dalam film terlihat ketika film dibuat untuk ditonton oleh khalayak secara serempak

## 5. Komunikan film bersifat heterogen

Khalayak film merupakan kumpulan anggota masyarakat yang keberadaannya terpencar, berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu film dibuat dalam berbagai bahasa.

### 2.2.2.3. Film dan Konstruksi Realitas Sosial

Isi media merupakan suatu bentuk konstruksi realitas sosial. Media melakukan konstruksi terhadap pesan-pesan yang disampaikan berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, suara, atau simbol-simbol lain melalui proses penyeleksian dan manipulasi tertentu sesuai keinginan ataupun ideologi media itu (Wibowo, 2011:125).

Dalam Bungin (2008:195) Berger dan Luckmann memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”.

Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dan Luckmann mengatakan bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif. Namun pada kenyataannya semua dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui pengetahuan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif sama (Bungin, 2008:195).

Realitas sosial menurut Berger dan Luckmann adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial (Wibowo, 2011:126). Dalam Bungin (2008:196), realitas sosial yang dimaksud oleh Berger dan Luckmann ini terdiri dari:

1. Realitas objektif, adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan.
2. Realitas simbolis, merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk.

3. Realitas subjektif, adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi.

Menurut mereka realitas sosial ini terbentuk melalui tiga tahap, yaitu (Wibowo, 2011:126):

1. Eksternalisasi yakni individu melakukan penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia.
2. Objektivasi yakni interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, produk sosial berada pada proses institusionalisasi. Individu memunculkan dirinya dalam produk-produk kegiatan manusia baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dunia bersama. Hak terpenting pada tahap ini adalah terjadinya pembuatan tanda-tanda sebagai isyarat bagi pemaknaan subjektif
3. Internalisasi, yaitu proses yang mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

Komunikasi sebagai bentuk interaksi tidak bisa lepas dari konstruksi-konstruksi realitas sosial. Isi media (termasuk film) menurut Sobur (2009:127) pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya.

Sobur menganggap film sebagai medium sempurna untuk mengekspresikan realitas kehidupan yang bebas dari konflik – konflik ideologis. Film sebagaimana media massa lainnya, lahir sebagai hasil reaksi dan persepsi pembuatnya dari peristiwa atau kenyataan yang terjadi disekelilingnya, lalu dari film tersebut akan lahir suatu kenyataan baru yang merupakan suatu realitas kamera. Pandangan seperti ini menyiratkan bahwa realita yang diekspresikan dalam film bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan adalah hasil dari suatu cara tertentu dalam mengkonstruksi realitas. Dengan demikian film bukan semata – mata memproduksi realitas, tetapi juga mendefinisikan realitas (2009:127).

Film selalu menyimpan ingatan terhadap fenomena atau bahkan realitas yang sekarang ini terjadi di kehidupan nyata atau masyarakat yang lalu dituang ke dalam bentuk karya audio visual berupa film. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konversi-konversi dan ideologi dari kebudayaannya (Sobur, 2009:128).

Film menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita, drama, humor, panggung, musik, dan trik teknis bagi konsumsi populer. Film juga hampir menjadi media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat, bahkan di wilayah pedesaan. Fenomena perkembangan film yang begitu cepat dan tak terprediksikan, membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Pencirian film sebagai “bisnis pertunjukan” dalam bentuk

baru bagi pasar yang meluas bukanlah keseluruhan ceritanya. Elemen penting lain dalam sejarah film adalah penggunaan film untuk propaganda sangatlah signifikan, terutama jika diterapkan untuk tujuan nasional atau kebangsaan, berdasarkan jangkauannya yang luas, sifatnya yang riil, dampak emosional, dan popularitas (McQuail, 2003:35).

Graeme Turner dalam Irawanto (1999:11) mengatakan film merupakan representasi dari realitas sosial dalam masyarakat. Turner menjelaskan bahwa film tidak mencerminkan atau bahkan merekam realitas. Seperti medium representasi yang lain ia mengkonstruksi dan ‘menghadirkan kembali’ gambaran dari realitas melalui kode-kode, konvensi-konvensi, mitos dan ideologi-ideologi dari kebudayaannya sebagaimana cara praktik signifikasi yang khusus dari medium.

### **2.2.3. Representasi**

Representasi merupakan kegunaan dari tanda. Marcel Danesi (dalam Wibowo, 2011:122) mendefinisikan representasi sebagai proses merekam ide, pengetahuan, atau pesan dalam beberapa cara fisik. Hal ini dapat didefinisikan lebih tepat sebagai kegunaan dari tanda yaitu untuk menyambungkan, melukiskan, meniru sesuatu yang dirasa, dimengerti, diimajinasikan, atau dirasakan dalam beberapa bentuk fisik.

Menurut Hall (2003:7), melalui representasi suatu makna dapat diproduksi dan dipertukarkan antar anggota masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa, representasi secara singkat adalah salah satu cara untuk memproduksi makna.

Menurut Hall dalam Wibowo (2011:122), ada dua proses representasi. Pertama, representasi mental, yaitu konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual), representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua, ‘bahasa’ yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam ‘bahasa’ yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.

Hall (2013:17) mengatakan bahwa representasi akan segala sesuatu berhubungan dengan aspek sosial budaya pada setiap manusia. Seperti yang ditulis dalam bukunya;

*“Member of the same culture must share concepts, images, and ideas which enable them to think and feel about the world in roughly similar ways. They must share, broadly speaking, the same ‘cultural codes’. In this sense, thinking and feeling are themselves ‘system of representations.’”*

Sistem representasi menurut Hall termasuk berpikir dan merasa yang berfungsi untuk memaknai sesuatu. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan hal tersebut diperlukan latar belakang pemahaman yang sama terhadap konsep, gambar, dan ide.

Pemaknaan terhadap sesuatu itu sendiri bisa berbeda antara individu dengan individu lain. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan budaya dalam setiap kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pemahaman yang tidak sama terhadap kode-kode budaya tertentu tidak dapat

memahami makna yang diproduksi oleh kelompok masyarakat lain (Hall, 2003:17).

Makna yang dimaksud yaitu makna yang dikonstruksi oleh manusia dan tidak dapat diubah. Makna direpresentasi melalui sistem representasi dan diikat oleh kode. Misalnya, kita menggunakan kata ‘mobil’ untuk memaknai konsep ‘mobil’ yang telah disepakati dalam masyarakat sebagai salah satu alat transportasi darat. Hal ini terbentuk karena kata ‘mobil’ itu sendiri merupakan kode yang telah dikenal oleh masyarakat. Kode inilah yang membuat masyarakat yang berada dalam suatu kelompok budaya mengerti dan menggunakan nama yang sama.

John Fiske, (dalam Wibowo, 2011:123) merumuskan tiga proses yang terjadi dalam representasi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Proses Representasi Fiske**

PERTAMA	REALITAS
	(Dalam bahasa tulis, seperti dokumen wawancara transkrip dan sebagainya. Dalam televisi seperti perilaku, <i>make up</i> , pakaian, ucapan, gerak-gerik dan sebagainya
KEDUA	REPRESENTASI
	Elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis seperti kata, proposisi, kalimat, foto, caption, grafik, dan sebagainya. Dalam TV seperti kamera, musik, tata cahaya,

	dan lain-lain)
KETIGA	IDEOLOGI
	Semua elemen diorganisasikan dalam koherensi dan kode-kode ideologi, seperti individualisme, liberalisme, sosialisme, patriaki, ras, kelas, materialisme, dan sebagainya.

Pertama, realitas, dalam proses ini peristiwa atau ide dikonstruksi sebagai realitas oleh media dalam bentuk bahasa gambar ini umumnya berhubungan dengan aspek seperti pakaian, lingkungan, ucapan ekspresi dan lain-lain. Kedua, representasi, dalam proses ini realitas digambarkan dalam perangkat-perangkat teknis seperti bahasa tulis, gambar, grafik, animasi, dan lain-lain. Ketiga, tahap ideologis, dalam proses ini peristiwa-peristiwa dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam konvensi konvensi yang diterima secara ideologis. Bagaimana kode-kode representasi dihubungkan dan diorganisasikan ke dalam koherensi sosial atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat.

Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru. Representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah-ubah. Setiap waktu terjadi proses negoisasi dalam pemaknaan. Jadi representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses statis tapi merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. Representasi merupakan suatu proses usaha

konstruksi. Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru, juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia, melalui representasi makna diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi proses penandaan, praktik yang membuat suatu hal bermakna sesuatu (Wibowo, 2011 : 123-124).

Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi adalah suatu proses untuk memproduksi makna dari konsep yang ada dipikiran kita melalui bahasa. Proses pemaknaan tersebut tergantung pada latar belakang pengetahuan dan pemahaman suatu kelompok sosial terhadap suatu tanda.

## **2.2.4 Semiotika, Tanda, dan Makna.**

### **2.2.4.1 Pengertian Semiotika**

Menurut Jakobson dalam Sobur (2009:15), semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda, berupa perangkat atau simbol yang kita gunakan dalam hubungan manusia. Karena itu Semiotika komunikasi adalah suatu pendekatan dan metode analisis yang digunakan untuk memahami tanda-tanda dalam proses komunikasi, yang meliputi enam unsur komunikasi yang meliputi pengirim, penerima kode (sistem tanda), pesan, saluran, dan acuan/hal yang dibicarakan.

Sobur sendiri dalam bukunya, *Semiotika Komunikasi*, mendefinisikan semiotika sebagai suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes; semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana

kemanusiaan (*humanity*) memaknai hal-hal (*things*). Memaknai (*to signify*) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (*to communicate*). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (2009:15).

Sedangkan dalam buku *Serba-Serbi Semiotika*, Aart Van Zoest (1991:5) menulis, semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya.

Masih dalam buku *Serba-Serbi Semiotika*, Aart van Zoest (1991:1) mengatakan bahwa semiotika modern mempunyai dua orang bapak; yang satu Charles Sanders Peirce (1839-1914) dan yang lainnya Ferdinand de Saussure (1857-1913). Kenyataan bahwa mereka tidak saling mengenal menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan yang penting, terutama dalam penerapan konsep-konsep, antara lain hasil karya para ahli semiotika yang berkiblat pada Peirce di satu pihak dan hasil karya para pengikut Saussure di pihak yang lain. Ketidaksamaan itu mungkin terutama disebabkan oleh perbedaan yang mendasar: Peirce adalah ahli filsafat dan ahli logika, sedangkan Saussure adalah cikal bakal linguistik umum.

Saussure dalam Sobur (2009:96) berpandangan bahwa fenomena (sosial) ada di luar individu. Ketika individu lahir berarti ia terlempar dalam suatu fenomena yang sudah ada, yang bukan ciptaannya, sesuatu yang diterima begitu saja dan mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan standard

masyarakat. gagasan ini mendasari penelitian Saussure tentang bahasa dapat dilihat sebagai fenomena yang terlepas dari penggunaan penuturannya karena bahasa tersebut adalah sesuatu yang diterima begitu saja dari generasi yang sudah ada. Bahasa bukan ciptaan individu itu. Bahasa adalah fakta sosial yang mau atau tidak mau harus diadopsi individu. Individu terperangkap dalam sistem bahasa, terperangkap karena tidak ada pilihan lain bagi pemakai untuk berkomunikasi. Saussure membayangkan ada suatu ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam masyarakat. di dalamnya akan dipelajari elemen-elemen tanda serta kaidah-kaidah yang mengaturnya, ilmu ini disebut semiologi. Semiologi didasarkan pada anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna dan berfungsi sebagai tanda, maka hal itu berarti berada dalam suatu sistem pembedaan dan konvensi yang melatarbelakanginya.

Selain itu semiotika juga dikembangkan dan dipelopori oleh filosof asal Amerika, Charles Sander Peirce. Peirce lebih berfokus pada masalah tanda (*non linguistic*). Titik tolak pemikiran Peirce tentang tanda adalah aksioma yang menjelaskan bahwa 'kognisi, pemikiran, dan bahkan manusia pada dasarnya adalah semiotika. Kalau Saussure menghindari apa yang disebut *referen* atau objek (materi) dalam sistem signifikasinya, Peirce menerima *referen* sebagai bagian dari teori tandanya. Peirce menawarkan model tradic dalam menguraikan tanda (*action of sign*) (Sobur, 2009:96).

Dalam semiotika, teori Peirce sering disebut sebagai “*grand theory*” karena gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem

penandaan. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan semua komponen dalam struktur tunggal (Wibowo, 2011:13).

Barthes (2012:9), dalam buku *Elemen-Elemen Semiologi*, mengatakan bahwa semiologi merepresentasikan rangkaian bidang kajian yang sangat luas, mulai dari seni, sastra, antropologi, media massa, dan sebagainya. Mereka yang menggunakan semiologi sebagai pendekatan di antaranya adalah linguist, filsuf, sosiolog, antropolog, sastrawan, sampai teoritis media dan komunikasi. Secara sederhana, semiologi bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda dan makna dalam bahasa, seni, media massa, musik, dan setiap usaha manusia yang dapat direproduksi atau direpresentasikan untuk seseorang atau audiens. Semiologi diperkenalkan pertama kali oleh Ferdinand de Saussure, bapak linguistik modern, dalam bukunya yang menjadi klasik dalam bidang linguistik, *Course de linguistique general*. Barthes pun menulis bahwa semiologi sering digunakan dalam analisis teks, selain hermeneutik, kritik sastra, analisis wacana, dan analisis isi. Semiologi memeriksa berbagai tanda dalam teks untuk mengkarakterisasikan struktur-struktur dan mengidentifikasi makna-makna potensialnya.

Secara garis besar, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Chandler dalam Wibowo (2004:44) menguraikan pemahaman tanda sebagai berikut:

Kita adalah spesies yang digerakan oleh hasrat untuk membuat makna. Kita adalah *homo significans*- sang pembuat makna. Kita membuat makna dengan kreasi dan interpretasi kita terhadap tanda. Bahkan menurut Peirce: “kita berfikir hanya dalam tanda”. Tanda bisa berbentuk kata-kata,

gambar-gambar, suara-suara, aroma, gerakan atau objek. Semua bisa menjadi tanda sejauh seseorang menafsirkannya sebagai sesuatu yang menandai suatu objek merujuk pada atau mewakili yang lain diluar dirinya. Kita menafsirkan sesuatu sebagai tanda umumnya secara tidak sadar dengan menghubungkannya dengan suatu sistem yang paling kita akrab hasil konvensi. Arti tanda inilah yang menjadi inyi perhatian semiotika.

Menurut Wibowo (2011:5), pada dasarnya analisis semiotika merupakan sebuah ikhtikar untuk merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang perlu dipertanyakan lebih lanjut ketika kita membaca teks atau narasi/ wacana tertentu. Analisisnya bersifat paradigmatic dalam arti berupaya menemukan makna.

#### **2.2.4.2. Semiotika dalam Film**

Pada umumnya film dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Hal yang paling menonjol dalam karakteristik film itu sendiri seperti halnya gambar dan suara: kata yang diucapkan (ditambah dengan efek suara yang mengiringi setiap adegan atau scene yang ada). Sistem semiotika yang paling penting dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yaitu tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Kini kita menyadari bahwa penanganan konsep Peirce seperti ikon, indeks, dan simbol dapat lebih memberikan perspektif semiotika dalam film (Sobur, 2004 : 127-130).

Film merupakan bidang yang amat relevan bagi analisis semiotik. Seperti yang dikemukakan Art Van Zoest, film dibangun dengan tanda-tanda semata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerjasama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Berbeda dengan tanda-tanda fotografi

statis, rangkaian tanda dalam film menciptakan imajinasi atau sistem penandaan. Pada film digunakan tanda-tanda ikonis yaitu tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Gambar yang dinamis pada sebuah film merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikannya (Kriyantono, 2008:263).

Analisis semiotik pada film berlangsung pada teks yang merupakan struktur dari produksi tanda. Bagian struktur penandaan dalam film biasanya terdapat dalam unsur tanda paling kecil, dalam film disebut scene. Scene dalam film merupakan satuan terkecil dari struktur cerita film atau biasa disebut alur. Alur sendiri merupakan sejumlah motif satuan- satuan fiksional terkecil yang terstruktur sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan tema serta melibatkan emosi-emosi. Sebuah alur biasanya mempunyai fungsi estetik pula, yakni menuntun dan mengarahkan perhatian penonton ke dalam susunan motif-motif tersebut. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi dibalik sebuah tanda (teks, iklan, berita). Karena sistem tanda sifatnya sangat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial di mana pengguna tanda tersebut berada (Danesi, 2010:3).

#### **2.2.5. Toleransi dan Intoleransi Agama**

Dalam pluralisme dan demokrasi, hak untuk berbeda tidak bisa diganggu. Semua orang, siapapun dia dan dari manapun asalnya, memiliki hak untuk berbeda sebagai hak dasar. Ini adalah bagian dari hak asasi. Dalam teori

multikulturalisme, hak untuk berbeda sering dikategorikan sebagai bagian dari *diversitas kultural* (Baghi, 2012:37).

Bhiku Parekh dalam Baghi (2012:37) mengategorikan diversitas kultural dalam tiga aspek berikut. Pertama, hak untuk berbeda dalam konteks subkultural, merujuk pada sekelompok masyarakat dari budaya yang sama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari menghidupi corak dan cara hidup yang berbeda. Misalnya kelompok para nelayan, tukang ojek, para gay, lesbian, dan seniman. Kelompok kedua dilihat dalam konteks perspektif, yaitu orang yang bersikap kritis terhadap segala prinsip atau nilai dari suatu kebudayaan serta berusaha untuk memperlihatkan misi transformatif di dalam sikap kritis itu. Kelompok gender dan gerakan *green peace* dapat mewakili kelompok ini. Kelompok terakhir biasanya ditemukan dalam komunitas-komunitas yang sudah mapan, terorganisir dan hidup sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka yang sudah *fixed*. Kelompok ini dilihat melalui konteks diversitas komunal. Mereka memiliki doktrin komprehensif yang tidak boleh dibongkar. Kelompok agama dan etnis masuk dalam kategori ini. Semua kategori Bhiku Parekh ini ditemukan dalam situasi Indonesia.

Menurut Baghi (2012:39) perbedaan tersebut tidak bisa diakui dengan mengabaikan toleransi. Kita dapat mencari atau menemukan toleransi ketika kita sungguh menyadari perbedaan-perbedaan.

Collins dan Farrugia (1996:335) memberikan definisi toleransi adalah membiarkan dalam damai orang-orang yang mempunyai keyakinan dan praktik

hidup yang lain. Menurut Soekanto (1985:518) toleransi adalah suatu sikap yang merupakan perwujudan pemahaman diri terhadap sikap pihak lain yang tidak setuju.

Pada tahun 1995, UNESCO mengeluarkan deklarasi prinsip-prinsip toleransi. Salah satunya berbunyi, “Toleransi adalah penghargaan, penerimaan, dan penghormatan terhadap kepelbagaian cara-cara kemanusiaan, bentuk-bentuk ekspresi dan kebudayaan”. Pembatasan toleransi ini dikonstruksi dalam kerangka pluralisme (Baghi, 2012:40).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran (Inggris: *tolerance*, Arab: *tasamuh*) yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dalam hubungan antar agama toleransi dapat berupa toleransi ajaran atau toleransi dogmatis dan toleransi bukan ajaran atau toleransi praktis (Hardjana, 1993:115). Dengan toleransi dogmatis maka pemeluk agama tidak menonjolkan keunggulan ajaran agamanya masing-masing. Dengan toleransi praksis maka pemeluk agama akan membiarkan pemeluk agama lain melaksanakan keyakinan mereka masing-masing. Pemahaman demikian akan melahirkan konsep damai dalam kehidupan manusia.

Indonesia sendiri telah memberikan landasan mengenai toleransi agama yang dimuat dalam:

1. Landasan idiil, yaitu Pancasila (sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa)

2. Landasan Konsitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”, dan Pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.
3. Landasan Strategis, yaitu Ketetapan MPR No. IV tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional tahun 2000, dinyatakan bahwa sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dnegan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Menurut Lumban (2014) dalam jurnalnya, toleransi merupakan lawan dari intoleransi. Wujud intoleransi yang paling merusak, tumbuh dari perbedaan agama. Intoleransi selalu saja di bidang agama.

Sebelum tahun 1980, bangsa Indonesia mudah membicarakan perihal kerukunan antar umat beragama, dan setelah itu secara berangsur-angsur muncul kerumitan di dalam representasi suatu agama, karena menguatnya tuntutan keterwakilan aliran-aliran di dalam suatu agama dan juga di dalam hubungan antar

umat beragama. Ujungnya adalah sejumlah kekerasan yang dikaitkan dengan idiom-idiom agama di beberapa daerah di tanah air (Untoro dan Madio, 2011:47).

Tidak dapat disangkal bahwa perjalanan sejarah kebudayaan-kebudayaan, agama dan politik melewati konflik atau pertentangan. Warisan Yunani-Romawi, Yahudi-Kristen, Kristen-Islam, renaissance, reformasi, pencerahan, gerakan nasionalis dan sosialis, semuanya tidak luput dari konflik. Konflik itu bisa terjadi dalam tatanan ide maupun dalam tatanan praksis (Baghi, 2012:40).

Menurut Baghi (2012:40), dalam perjalanan sejarah, ada satu hal yang tidak dapat ditenggang (*intolerable*). Hal itu adalah intoleransi, yang mengacu pada situasi politik yang belum stabil, agama-agama sering berbenturan yang satu dengan yang lain, dan etnis yang satu berperang melawan etnis yang lain.

Sejarah mencatat sebagian besar perang dimulai dari tidak adanya toleransi. Artinya, intoleransi merupakan penyubur kebencian, bentuk perilaku bodoh segelintir orang. Intoleransi juga penyubur kecurigaan dan menutup pintu dialog (Lumban, 2014)

Musahadi (2000:81), menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi pada saat ini adalah terjadinya perubahan sifat agama. Masyarakat Indonesia mengarah kepada sebuah gerakan yang menggunakan agama tidak lebih sebagai suatu identitas. Agama sebagai sebuah identitas tak hanya merupakan suatu kebutuhan psikologis, namun juga membangun tembok pemisah dan berakibat pada pertentangan kepentingan-kepentingan duniawi antar anggota dan komunitas agamawi yang berbeda-beda.

Pada perkembangan selanjutnya, reformasi telah membawa perubahan cara bertindak pemerintah dalam menghadapi intoleransi agama. Reformasi yang menuntut diadakannya perubahan terutama dalam menjamin kebebasan rakyatnya justru membuat pemerintah terkesan tidak memiliki otoritas yang besar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah cenderung bersifat netral dan tidak dapat berdiri tegak dalam konstitusi yang ada. Pemerintah bahkan menyerahkan otoritas untuk menilai sebuah ajaran agama dan kepercayaan kepada organisasi keagamaan korporatis (Susetyo, 2008). Hal ini dapat kita lihat dalam kasus Ahmadiyah. Di beberapa daerah, hak-hak mereka dibatasi, mulai dari soal membangun tempat ibadah hingga ke persoalan ibadah haji. Bahkan di Lombok, Tasikmalaya, dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mereka mengalami pengusiran dan perusakan pemukiman dan tempat-tempat ibadah (Mulia, 2008)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam masyarakat reformasi telah meningkat politik identitas yang semakin memperkeruh konflik antar agama. Meningkatnya politik identitas merupakan faktor yang cukup mempengaruhi konflik antar agama karena: identitas ini dipakai sebagai alat artikulasi atas keresahan sosial yang terjadi (Sitompul, 2005:33). Setiap identitas akan merasa bahwa kelompoknya yang paling benar dan memiliki nilai lebih dari kelompok identitas lainnya. Hal inilah yang mendorong terjadinya sikap-sikap fanatik dari golongan agama tertentu terhadap golongan agama lainnya.

Menurut Kholid (2006), ketika suatu masalah diartikan dengan menggunakan bahasa agama, maka biasanya agama cenderung akan memaksa seseorang untuk bersikap absolut dan susah untuk melakukan negosiasi. Jika

negosiasi tertutup karena keabsolutan yang ditimbulkan dari bahasa agama itu, maka dengan sendirinya jalan kekerasanlah yang akan segera membayang. Sehingga tidak mengherankan bila hasil tingkat “Toleransi Sosial Masyarakat Indonesia” yang dilaksanakan di 33 provinsi dengan 1.200 responden, menunjukkan tingkat toleransi antarumat beragama di negeri ini cukup rendah. Data ini dikutip dari artikel pada Tempo.com. Sebanyak 42,3 responden menyatakan keberatan jika penganut agama lain mendirikan tempat ibadah di lingkungannya, hanya 38,1% saja yang tidak merasa keberatan.

Angka tersebut pun meningkat setelah survei kembali dilakukan pada Februari 2012 oleh lembaga studi Center of Strategic dan International Studies yang menunjukkan toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Pada survei yang dilakukan di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden ini menghasilkan data sebanyak 68,2% tidak setuju adanya pembangunan rumah ibadah lain di lingkungannya. Hanya 22,1% yang tidak berkeberatan.

Menurut catatan Setara Institute, yang dikutip oleh VOA Indonesia pada 22 Oktober 2012 dalam artikel yang berjudul *Intoleransi Meningkatkan di Indonesia*, kekerasan yang terjadi antara penganut keyakinan selama 2007 saja ada 135 kasus, pada 2009 meningkat menjadi 200 kasus. Jumlah itu meningkat lagi menjadi 216 kasus pada 2010. Pada 2011, kekerasan meningkat menjadi 244 kasus, dan 2012 mencapai 264 kasus. Dalam kurun enam bulan pada 2013, setidaknya ada 203 kasus kekerasan dan intoleransi.

Tahun 2014 pun tidak luput dari kasus intoleransi agama. Seperti yang dikutip dalam Tempo, dua insiden yang dicap sebagai perilaku intoleran dalam agama terjadi di Yogyakarta. Kasus pertama berupa penyerangan terhadap rumah Direktur Galangpress Julius Felicianus saat berlangsung ibadah Rosario ke-29 pada 29 Mei 2014 dan perusakan rumah yang difungsikan sebagai gereja, pada 1 Juni 2014.

Paul Ricoeur dalam Baghi (2012:40-41) melihat intoleransi sebagai negativitas dari toleransi. Sebagai penyangkalan terhadap toleransi, intoleransi adalah *intoreable*. Entahkan ia bercorak religius ataupun politis, intoleransi tetap merupakan hal yang tidak dapat ditenggang. Alasan utama terletak pada akibat yang ditimbulkan olehnya. Tindakan intoleransi, entah bermotif religius, kultural atau politis, selalu destruktif, dan karena itu merugikan.

U  
M  
M  
N

### 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

